

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON
2022**



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 470/1311/Disdukcapil/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang pelaksanaan putusan MK;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 15).

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Manusia (IKM)
2. Prosentase Keluarga dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud sebagaimana diktum kesatu merupakan Acuan Ukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

KETIGA : Target Capaian Indikator Kinerja Utama yang dimaksud point I sebagaimana terlampir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon



H. IMAN SUPRIADI, S.Sos, M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19670208 199403 1 013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB.I	PENDAHULUAN	1
	A Latar Belakang	1
	B Maksud dan Tujuan	3
	C Landasan Hukum Penyusunan	4
BAB.II	Gambaran Umum Perangkat Daerah	6
	A Capaian Kinerja	6
	B Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	17
	C Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2022	19
BAB.III	INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
BAB. IV	PENUTUP	29
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

a). Rencana Strategi Organisasi

1. Visi dan Misi

VISI

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mempunyai VISI :

"Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Cirebon"

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon harus mempunyai Misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima yaitu :

Misi : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam bidang Administrasi Kependudukan

2. TUJUAN DAN SASARAN

- TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsi yang diemban, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Tujuan juga menggambarkan isu-isu strategis yang harus dihadapi dan diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dapat merealisasikan misi yang diemban. Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah ***Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik***

- SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Sasaran		Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	2. Prosentase Penduduk dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap

3. STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Adalah faktor penting dalam proses perencanaan strategis cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana akan dikemukakan berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Optimalisasi manajemen pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Bimtek dan Pelatihan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang memadai untuk mendukung pelayanan prima
		Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik	Penyediaan Inovasi di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
			Peningkatan Pelayanan yang efisien dan efektif

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20)
15. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 34).

BAB II
GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. Capaian Kinerja Organisasi Semester I Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak 2 (dua) sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana tergambar dalam uraian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan.
2. Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan untuk mendukung pencapaian Sasaran ke 1 pada pada semester I Tahun 2022 sebagai berikut :

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Sisa DPA
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,967,100,750	4,916,949,545	27.37%	13,050,151,205
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,792,600	23,900,500	42.84%	31,892,100
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,088,600	14,005,400	51.70%	13,083,200
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,000,000	4,170,300	37.91%	6,829,700
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,704,000	5,724,800	32.34%	11,979,200
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,014,279,400	2,842,293,078	40.52%	4,171,986,322
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,007,616,000	2,839,166,078	40.52%	4,168,449,922
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,877,000	3,127,000	80.66%	750,000
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,786,400	-	0.00%	2,786,400
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,150,224,050	1,753,813,773	17.28%	8,396,410,277
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,931,700	3,967,700	44.42%	4,964,000
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,527,600,000	8,663,000	0.19%	4,518,937,000
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,791,900	651,600	36.36%	1,140,300
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,600,000	2,750,000	41.67%	3,850,000
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,422,500	31,232,400	99.40%	190,100
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22,050,000	5,775,000	26.19%	16,275,000
	7 Penyediaan Bahan/Material	5,494,215,200	1,678,027,100	30.51%	3,816,188,100
	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57,612,750	24,746,973	42.95%	32,865,777
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270,780,000	71,316,525	26.34%	199,463,475
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242,460,000	61,832,025	25.50%	180,627,975

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Sisa DPA
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,320,000	9,484,500	33.49%	18,835,500
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476,024,700	225,625,669	47.40%	250,399,031
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,215,000	2,496,700	20.44%	9,718,300
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103,500,000	44,540,000	43.03%	58,960,000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	360,309,700	178,588,969	49.57%	181,720,731

Program, Kegiatan dan Subkegiatan untuk mendukung pencapaian Sasaran ke 2 pada pada semester I Tahun 2022 sebagai berikut :

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Sisa DPA
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,645,053,900	628,787,540	38.22%	1,016,266,360
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	892,659,200	380,590,120	42.64%	512,069,080
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	876,432,500	372,643,220	42.52%	503,789,280
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	805,133,000	338,075,560	41.99%	467,057,440
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8,575,000	5,425,000	63.27%	3,150,000
3	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	82,724,500	29,142,660	46.46%	33,581,840
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16,226,700	7,946,900	48.97%	8,279,800
4	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	16,226,700	7,946,900	48.97%	8,279,800
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	332,203,500	138,074,840	41.56%	194,128,660
3	Pelayanan Pencatatan Sipil	332,203,500	138,074,840	41.56%	194,128,660
5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	305,889,600	123,292,040	40.31%	182,597,560
6	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	26,313,900	14,782,800	56.18%	11,531,100
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	372,389,200	97,976,360	26.31%	274,412,840

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Sisa DPA
4	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	76,805,200	16,040,000	20.88%	60,765,200
7	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	34,927,000	9,675,000	27.70%	25,252,000
8	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	41,878,200	6,365,000	15.20%	35,513,200
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	295,584,000	81,936,360	27.72%	213,647,640
9	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	295,584,000	81,936,360	27.72%	213,647,640
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47,802,000	12,146,220	25.41%	35,655,780
6	Penyusunan Profil Kependudukan	47,802,000	12,146,220	25.41%	35,655,780
10	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	47,802,000	12,146,220	25.41%	35,655,780

Pada tahun anggaran 2022 sebanyak 2 (dua) sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana tergambar dalam uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas

- Sasaran ini meliputi indikator adalah Indeks Kepuasan Masyarakat

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 17.967.100.750,- dan untuk semester I terealisasi sebesar Rp.4.916.949.545,- sisa sebesar Rp. 13.050.151.205,- atau tercapai sebesar 27,37 %.

Outcome Program ini adalah Prosentase Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipenuhi, Prosentase Peningkatan Laporan keuangan yang telah dipenuhi dari yang seharusnya dan Prosentase Peningkatan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah dipenuhi dari yang seharusnya.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.55.792.600,- dan untuk

semester I terealisasi sebesar RP.23.900.500,- sisa sebesar Rp.31.892.100,- atau tercapai sebesar 42,84%

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.088.600,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.14.005.400 sisa sebesar Rp.13.083.200,- atau tercapai sebesar 51,70%.

Sub Outputnya adalah Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan dan Jumlah dokumen renstra, review renstra yang diselesaikan

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.4.170.300 sisa sebesar Rp. 6.829.700,- atau tercapai sebesar 37,91%.

Sub Outputnya adalah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan (LPPD,LKPJ, LAKIP, IKU dan PERKIN)

- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.704.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.5.724.800,- sisa sebesar Rp.11.979.200,- atau tercapai sebesar 32,34 %.

Sub Outputnya adalah Tersedianya Dokumen Laporan IKM dan Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 7.014.279.400,- dan semester I terealisasi sebesar RP.2.842.293.078,- sisa sebesar Rp.4.171.986.322,- atau tercapai sebesar 40,52%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen / laporan Administrasi Keuangan yang dibuat.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.007.616.000, dan semester I terealisasi sebesar Rp.2.839.166.078,- sisa sebesar Rp.4.168.449.922,- atau tercapai sebesar 40,52 %.

Sub Outputnya adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.87700.0,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.3.127.000,- sisa sebesar Rp.750.000,- atau tercapai sebesar 80,66 %.

Sub Outputnya adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.786.400,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.0,- sisa sebesar Rp.2.786.400,- atau tercapai sebesar 0 %.

Sub Outputnya adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang diselesaikan.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.10.150.224.050,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.1.753.813.773,- sisa sebesar Rp.8.396.410.277,- atau tercapai sebesar 17,28%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan kantor.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.931.700,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.3.967.700,- sisa sebesar Rp. 4.964.000,- atau tercapai sebesar 44,42%

Sub Outputnya adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.527.600.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.8.663.000,- sisa sebesar Rp. 4.518.937.000,- atau tercapai sebesar 0,19%

Sub Outputnya adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.791.900,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.651.600,- sisa sebesar Rp. 1.140.300,- atau tercapai sebesar 36,36%

Sub Outputnya adalah Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.600.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.2.750.000,- sisa sebesar Rp.3.850.000,- atau tercapai sebesar 41,67%

Sub Outputnya adalah Jumlah Jamuan makan yang disiapkan.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.422.500,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.31.232.400,- sisa sebesar Rp. 190,- atau tercapai sebesar 99,49%

Sub Outputnya adalah Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.050.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.5.775.000,- sisa sebesar Rp.16.275.000,- atau tercapai sebesar 26,19%

Sub Outputnya adalah Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan.

- g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.494.215.200,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.1.676.027.100,- sisa sebesar Rp. 3.818.188.100,- atau tercapai sebesar 30,51%

Sub Outputnya adalah Jumlah jenis ATK yang tersedia.

- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.612.750,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.24.746.973,- sisa sebesar Rp.32.865.777,- atau tercapai sebesar 42,95%

Sub Outputnya adalah Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 270.780.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.71.316.525,- sisa sebesar Rp.199.463.475,- atau tercapai sebesar 26,34%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.460.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.61.832.025,- sisa sebesar Rp.180.627.975,- atau tercapai sebesar 25,50%

Sub Outputnya adalah Jumlah Rekening yang di bayar

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.320.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.9.484.500,- sisa sebesar Rp.18.835.500,- atau tercapai sebesar 33,49%

Sub Outputnya adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.476.024.700,- dan semester I terealisasi sebesar RP.225.625.669,- sisa sebesar Rp.250.399.031,- atau tercapai sebesar 47,40%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan BMD Yang Sesuai Standard Kebutuhan Pelayanan Prima.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.215.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.2.496.700,- sisa sebesar Rp.9.718.3,- atau tercapai sebesar 20,44%

Sub Outputnya adalah Jumlah Pajak Kendaraan/STNK bermotor roda empat dan roda dua yang terbayarkan

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.500.000,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.44.540.000,- sisa sebesar Rp.58.960.000,- atau tercapai sebesar 40,03%

Sub Outputnya adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang diberikan Bahan Bakar Minyak / BBM.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.360.309.700,- dan semester I terealisasi sebesar Rp.178.588.969,- sisa sebesar Rp.181.720.731,- atau tercapai sebesar 49,57%

Sub Outputnya adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati.

Pencapaian indikator kinerja pada semester I Tahun 2022 urusan ini adalah meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebanyak 102.145 lembar dari target 260.000 lembar atau sebesar 39,41%, cakupan penerbitan KTP Elektronik sebanyak 76.835 keping dari target 250.000 keping atau sebesar 30,73%, Cakupan Surat Pindah Datang sebanyak 17.942 lembar dari target 27.000 lembar atau sebesar 66,45%, Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebanyak 27.967 lembar dari target 65.000 lembar atau sebesar 43,93 %,

Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut
: **Tabel Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022**

NO	KEGIATAN	TARGET 2022	PENCAPAIAN smstr I / 2022		
1	Penerbitan Kartu Keluarga	220.000	102.457		
2	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	200.000	76.835		
3	Surat Pindah Datang	27.000	17.942		
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	100.000	38.524		
5	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	65.000	27.967		
6	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	1.200	2.428		
7	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya				
	Akta Perkawinan			50	6
	Akta Perceraian			10	1
	Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan ANak	25	5		

Sumber : Data Simonek Semester I Tahun 2022

a) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Rincian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Alokasi anggaran untuk Program Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 892.659.200,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar Rp. 380.590.120,- sisa sebesar Rp. 512.069.080,- atau tercapai sebesar 42,64%.

Outcome Program ini adalah Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA, Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Keluarga / KK) dan Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP EI

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp.876.432.500,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar RP.372.643.220,- sisa sebesar Rp. 503.789.280,- atau tercapai sebesar 42,52%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang diterbitkan dari tiap-tiap Sub Kegiatan

Kegiatan terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.805.133.000,- dan terealisasi sebesar Rp.338.075.560,- sisa sebesar Rp.467.057.440,- atau tercapai sebesar 41,99%.

Sub Outputnya adalah Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA), Terbitnya Kartu Keluarga

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.575.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.425.000,- sisa sebesar Rp 3.150.000,- atau tercapai sebesar 85,47%

Sub Outputnya adalah Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP El

- c. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.724.500,- dan terealisasi sebesar Rp.29.142.660,- sisa sebesar Rp.33.581.840,- atau tercapai sebesar 46,46%

Sub Outputnya adalah Jumlah pemohon yang menerima layanan Surat keterangan pindah, datang, SKTT.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 16.226.700,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar RP. 7.946.900,- sisa sebesar Rp. 8.279.800,- atau tercapai sebesar 48,97%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang diterbitkan dari tiap-tiap Sub Kegiatan

Kegiatan terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.226.700,- dan terealisasi sebesar

Rp.7.946.900,- sisa sebesar Rp. 8.279.800,- atau tercapai sebesar 48,97%.

Sub Outputnya adalah Jumlah warga yang terfasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kabupaten Cirebon

2. Program Pencatatan Sipil

Alokasi anggaran untuk Program Pencatatan Sipil sebesar Rp.332.203.500,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar Rp.138.074.840,- sisa sebesar Rp.5.779.330,- atau tercapai sebesar 41,56%.

Outcome Program ini adalah Prosentase Penduduk yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran yang telah terkonversi ke dalam Database SIAK, Rata-rata Prosentase realisasi Akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan (Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan akte pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak).

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar Rp.332.203.500,- dan terealisasi Semester I Tahun 2022 sebesar Rp.138.074.840,- sisa sebesar Rp.5.779.330,- atau tercapai sebesar 41,56%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 305.889.600,- dan terealisasi sebesar Rp.123.292.040,- sisa sebesar Rp.182.597.560,- atau tercapai sebesar 40,31%.

Sub Outputnya adalah Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran, Terbitnya Dokumen Akta Kematian, Terbitnya Dokumen Akta Perkawinan, Terbitnya Dokumen Akta perceraian, Terbitnya Dokumen Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak

- b. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.313.90,- dan terealisasi sebesar Rp.14.782.800,- sisa sebesar Rp.11.531.100,- atau tercapai sebesar 56,18%

Sub Outputnya adalah Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelaksanaan mobile KTP E!

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp.372.389.200,- dan terealisasi sebesar Rp.97.976.360,- sisa sebesar Rp.274.412.840,- atau tercapai sebesar 84,24%.

Outcome Program ini adalah Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan telah didukung dengan Aplikasi khusus dan Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp.76.805.200,- dan terealisasi sebesar Rp.16.040.000,- sisa sebesar Rp. 76.805.200,- atau tercapai sebesar 20,88%

Output Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.927.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.675.000,- sisa sebesar Rp.25.252.000,- atau tercapai sebesar 27,70%.

Sub Outputnya adalah Dokumen Database Penduduk yang Valid.

- b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.878.200,- dan terealisasi sebesar Rp.6.365.000,- sisa sebesar Rp.35.513.200,- atau tercapai sebesar 15,20%

Sub Outputnya adalah Jumlah Perjanjian Kerja Sama / PKS yang dihasilkan

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp.295.584.000,- dan terealisasi semester I Tahun 2022 sebesar Rp.81.936.360,- sisa sebesar Rp.213.647.640,- atau tercapai sebesar 27,72%.

Output Kegiatan ini adalah Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang terselenggara.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.295.584.000,- dan terealisasi semester I Tahun 2022 sebesar Rp.81.936.360,- sisa sebesar Rp.213.647.640,- atau tercapai sebesar 27,72%

Sub Outputnya adalah Terpelihara dan Terkoneksinya SIAK Online Di 40 Kecamatan dan 1 Dinas

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar Rp.47.802.000,- dan terealisasi semestersre I Tahun 2022 sebesar Rp.12146220,- sisa sebesar Rp.35.655.780,- atau tercapai sebesar 25,41%.

Outcome Program ini adalah Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan sebesar Rp.47.802.000,- dan terealisasi semestersre I Tahun 2022 sebesar Rp.12146220,- sisa sebesar Rp.35.655.780,- atau tercapai sebesar 25,41%..

Output Kegiatan ini Jumlah dokumen / laporan yang dibuat dari tiap-tiap sub kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.802.000,- dan terealisasi semester I Tahun 2022 sebesar Rp.12146220,- sisa sebesar Rp.35.655.780,- atau tercapai sebesar 25,41%.

Sub Outputnya adalah Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan yang mutakhir.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2014 – 2019, ada 4 (empat) sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2021, dan ada 2 (dua) sasaran yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu :

1. Meminimalisir keluhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan

Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan dokumen identitas kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, pada tahun 2021 target penerbitan KTP-EI sebanyak 200.000 keping dan KK sebanyak 250.000. Realisasi untuk tahun 2021 ini penerbitan KTP sebanyak 270.183 keping atau 135,1%, dan KK sebanyak 169.513 lembar atau 67,8% .

2. Terlayannya Hak-hak Status Pribadi dan Status Hukum Bagi Penduduk

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil dengan target penerbitan Akta Pencatatan Sipil pada Tahun 2021 sejumlah 65.000 lembar, adapun realisasi adalah sebagai berikut :

Pencapaian indikator kinerja pada semester I Tahun 2022 urusan ini adalah meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebanyak 102.145 lembar dari target 260.000 lembar atau sebesar 39,41%, cakupan penerbitan KTP Elektronik sebanyak 76.835 keping dari target 250.000 keping atau sebesar 30,73%, Cakupan Surat Pindah Datang sebanyak 17.942 lembar dari target 27.000 lembar atau sebesar 66,45%, Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebanyak 27.967 lembar dari target 65.000 lembar atau sebesar 43,93 %,

Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut : **Tabel Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022**

NO	KEGIATAN	TARGET 2022	PENCAPAIAN smstr I / 2022
1	Penerbitan Kartu Keluarga	220.000	102.457
2	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	200,000	76.835
3	Surat Pindah Datang	27,000	17.942
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	100.000	38.524
5	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	65,000	27.967
6	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	1.200	2.428
7	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya		
	Akta Perkawinan	50	6
	Akta Perceraian	10	1
	Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan ANak	25	5

Sumber : Data Simonek Semester I Tahun 2022

C. Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2022

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Sisa DPA
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	892,659,200	380,590,120	42.64%	512,069,080
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	876,432,500	372,643,220	42.52%	503,789,280
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	805,133,000	338,075,560	41.99%	467,057,440
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8,575,000	5,425,000	63.27%	3,150,000
3	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	62,724,500	29,142,660	46.46%	33,581,840
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16,226,700	7,946,900	48.97%	8,279,800
4	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	16,226,700	7,946,900	48.97%	8,279,800
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	332,203,500	138,074,840	41.56%	194,128,660
3	Pelayanan Pencatatan Sipil	332,203,500	138,074,840	41.56%	194,128,660
5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	305,889,600	123,292,040	40.31%	182,597,560
6	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	26,313,900	14,782,800	56.18%	11,531,100
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	372,389,200	97,976,360	26.31%	274,412,840
4	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	76,805,200	16,040,000	20.88%	60,765,200
7	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	34,927,000	9,675,000	27.70%	25,252,000
8	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	41,878,200	6,365,000	15.20%	35,513,200
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	295,584,000	81,936,360	27.72%	213,647,640
9	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	295,584,000	81,936,360	27.72%	213,647,640
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47,802,000	12,146,220	25.41%	35,655,780
6	Penyusunan Profil Kependudukan	47,802,000	12,146,220	25.41%	35,655,780
10	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	47,802,000	12,146,220	25.41%	35,655,780
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,967,100,750	4,916,949,545	27.37%	13,050,151,205
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,792,600	23,900,500	42.84%	31,892,100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,088,600	14,005,400	51.70%	13,083,200

No	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Jumlah Alokasi (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Persen (%)	Sisa DPA
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,000,000	4,170,300	37.91%	6,829,700
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,704,000	5,724,800	32.34%	11,979,200
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,014,279,400	2,842,293,078	40.52%	4,171,986,322
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,007,616,000	2,839,166,078	40.52%	4,168,449,922
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,877,000	3,127,000	80.66%	750,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,786,400	-	0.00%	2,786,400
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10,150,224,050	1,753,813,773	17.28%	8,396,410,277
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,931,700	3,967,700	44.42%	4,964,000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,527,600,000	8,663,000	0.19%	4,518,937,000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,791,900	651,600	36.36%	1,140,300
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,600,000	2,750,000	41.67%	3,850,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,422,500	31,232,400	99.40%	190,100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22,050,000	5,775,000	26.19%	16,275,000
7	Penyediaan Bahan/Material	5,494,215,200	1,676,027,100	30.51%	3,818,188,100
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57,612,750	24,746,973	42.95%	32,865,777
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270,780,000	71,316,525	26.34%	199,463,475
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242,480,000	61,832,025	25.50%	180,627,975
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,320,000	9,484,500	33.49%	18,835,500
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476,024,700	225,625,669	47.40%	250,399,031
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,215,000	2,496,700	20.44%	9,718,300
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103,500,000	44,540,000	43.03%	58,960,000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	360,309,700	178,588,969	49.57%	181,720,731
TOTAL		19,612,154,650	5,545,737,085	28.28%	14,066,417,565

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Perencanaan Kinerja Perubahan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan (*keluaran/output*) tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*hasil/outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
2. Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Cirebon yang diamanatkan oleh undang-undang atau Peraturan Daerah;
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Cirebon, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dapat dikualifikasi dan diukur. Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan tahunan;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;

4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Urusan	Program	Outcome/Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Output/Target	Pagu Kegiatan	Keterangan
1	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	4	5	6	7	8
1	Non Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>Prosentase Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipenuhi</p> <p>Prosentase Peningkatan Laporan keuangan yang telah dipenuhi dari yang seharusnya</p> <p>Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah dipenuhi dari yang seharusnya</p>			17.776.828.275	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel	55.792.600,00	
			Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan	Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan Target : 2	27.088.600,00	
			Jumlah dokumen DPA/DPPA, SP/IKM, Monev, SPIP, Renaksi RB dan PPK, LKPJ, LAKJP, dan LPPD SKPD yang diselesaikan	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen DPA/DPPA, SP/IKM, Monev, SPIP, Renaksi RB dan PPK, LKPJ, LAKJP, dan LPPD SKPD yang diselesaikan Target : 2	11.000.000,00	
			Tersedianya Dokumen Laporan IKM, Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan	Subkeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan IKM, Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Target : 1	17.704.000,00	

No	Urusan	Program	Outcome/Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Output/Target	Pagu Kegiatan	Keterangan
			Pelaporan				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang transparan , akuntabel dan informatif	6.750.860.100	
			Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan Target : 63 pegawai	6.744.196.700	
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan Target : 1	3.877.000,00	
			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang diselesaikan	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang diselesaikan Target : 1	2.786.400,00	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.223.370.875	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan Target : 9 jenis	8.931.700,00	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan Target : 15 Jenis	4.527.600.000,00	
			Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia Target : 2	1.791.900,00	
			Jumlah logistik / makanan dan minuman yang disiapkan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik / makanan dan minuman yang disiapkan Target : 11 bulan	6.600.000,00	

No	Urusan	Program	Outcome/Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Output/Target	Pagu Kegiatan	Keterangan
			Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan Target : 19	31.422.500,00	
			Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perurlan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan Target : 3 jenis surat kabar	22.050.000,00	
			Jumlah jenis ATK yang tersedia	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang tersedia Target : 75 jenis	5.494.215.200,00	
			Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target : 250 kali	130.759.575,00	
			Pemenuhan Sarana Prasarana Yang Sesuai Standard Kebutuhan PelayananPrima.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Sarana Prasarana Yang Sesuai Standard Kebutuhan PelayananPrima.	270.780.000,00	
			Jumlah Rekening yang di bayar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang di bayar Target : 4 jenis	242.460.000,00	
			Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara Target : 20 jenis	28.320.000,00	
			Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	476.024.700,00	
			Jumlah STNK Kendaraan bermotor roda dua dan empat yang terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK Kendaraan bermotor roda dua dan empat yang terbayarkan Target : 34 strk	12.215.000,00	
			Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat dengan kondisi baik (aman dan nyaman) dan siap pakai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat dengan kondisi baik (aman dan nyaman) dan siap pakai Target : 21	103.500.000,00	
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati Target : 1 unit bangunan	360.309.700,00	
2	Urusan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Keluarga dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang			1.392.659.200,00	

No	Unsan	Program	Outcome/Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Output/Target	Pagu Kegiatan	Keterangan
			lengkap				
			Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA)				
			Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Keluarga / KK)				
			Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik / KTP El)	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase Cakupan Dokumen Pendaftaran Penduduk	1.376.432.500,00	
			Cakupan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Terbitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik 200.000 keping, Terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA) 25.000 keping, Terbitnya Kartu Keluarga 250.000 lembar	1.305.133.000,00	
			Pelaksanaan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el secara Mobile berjalan dengan baik	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelaksanaan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el secara Mobile berjalan dengan baik Target : 1 dokumen	8.575.000,00	
			Surat keterangan pindah, datang, SKTT	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Surat keterangan pindah, datang, SKTT Target : 27000 pemohon	62.724.500,00	
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase Cakupan Dokumen Pendaftaran Penduduk	16.226.700,00	
				Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah warga yang terfasilitasi Administrasi Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kabupaten Cirebon	16.226.700,00	

No	Urusan	Program	Outcome/Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Output/Target	Pagu Kegiatan	Keterangan
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran			332.203.500,00	
			prosentase pemenuhan pelayanan Akta-akta pencatatan sipil	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	332.203.500,00	
			Dokumen Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak Pemohon	Pencatatan, Penstausahan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak Pemohon 65000 kutipan	305.889.600,00	
			laporan pelayanan akta kelahiran secara mobil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan akta kelahiran secara mobil : 1 kegiatan	26.313.900,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)			372.389.200,00	
			Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik				
				Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersediannya Database Kependudukan yang valid	76.805.200,00	
			Database Penduduk yang Valid	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Database Penduduk yang Valid 5 Dokumen	34.827.000,00	
			Dokumen Laporan Pemanfaatan Data dan Aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah aplikasi penyajian data kependudukan, 1 Aplikasi	41.878.200,00	
			Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terpelihara dan Terkoneksinya Jaringan SIAK dengan baik	295.584.000,00	

No	Ususan	Program	Outcome/Target	Kegiatan / Sub Kegiatan	Output/Target	Pagu Kegiatan	Keterangan
			dengan baik				
				Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1). Berfungsi dan Terkoneksi SIAK Online di 40 Kecamatan Dinas 41 unit 2). Terpilihara dan Terkoneksi SIAK Online Di 40 Kecamatan dan 1 Dinas	295.584.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersediannya Data Profil Kependudukan			47.802.000,00	
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Tersediannya Profil Kependudukan Target 1 Dokumen	47.802.000,00	

BAB IV PENUTUP

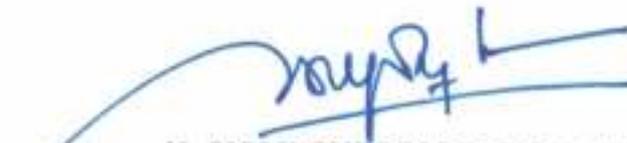
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit Kerja.

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan dan dapat dikualifikasi dan diukur.

Dengan demikian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Cirebon, Oktober 2022

↳ KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN ↳
SIPIL KABUPATEN CIREBON,


H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19670208 199403 1 013